

BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konflik sosial terjadi ketika terdapat ketidaksepahaman dalam masyarakat, yang memicu ketegangan dan mengganggu stabilitas sosial. Konflik PKH di Desa Tegalsari terjadi secara vertikal, menggambarkan perbedaan posisi sosial antara kelompok superordinat (perangkat desa, pendamping PKH, dan penerima PKH) yang memiliki otoritas dan akses terhadap manfaat PKH, dengan kelompok subordinat (non penerima PKH) yang berada di posisi sosial lebih rendah dan tidak memiliki akses terhadap bantuan tersebut.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa konflik sosial tidak hanya terjadi antara non penerima PKH dengan penerima PKH, tetapi juga terjadi antara non penerima PKH dengan perangkat desa. Bentuk konflik yang teridentifikasi mencakup persaingan antar masyarakat, sindiran yang disampaikan oleh non penerima PKH, serta protes kepada pendamping PKH maupun perangkat desa.

Konflik terjadi karena kecemburuan sosial akibat bantuan yang dirasa tidak tepat sasaran, keterbatasan kuota bantuan dari pemerintah pusat, data penerima bantuan yang tidak diperbarui secara berkala, dan kedekatan antara penerima PKH dengan perangkat desa. Konflik ini berdampak pada kekecewaan masyarakat non penerima PKH kepada perangkat desa, perselisihan antar anggota masyarakat sehingga mengganggu interaksi sosial, dan meningkatnya solidaritas para penerima PKH karena mereka secara bersama-sama berusaha memperbaiki hubungan dengan masyarakat non penerima, dengan cara mendukung usaha dan membeli dagangan dari masyarakat non penerima PKH.

Resolusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi konflik ini yaitu dengan meningkatkan transparansi kepada masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program, mulai dari proses seleksi hingga verifikasi penerima dan dilakukan melalui forum musyawarah desa, mengajukan data pergantian penerima PKH, memberikan bantuan sosial lainnya seperti BLT-DD, bantuan gizi, kesehatan dan bantuan untuk lansia, serta melaporkan

ketidaktepatan penerima PKH melalui aplikasi Cek Bansos dengan memanfaatkan fitur "Usul Sanggah".

B. Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan terkait konflik sosial pasca pemberian bantuan PKH di Desa Tegalsari, terdapat sejumlah rekomendasi strategis yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait agar konflik serupa tidak terulang dan program bantuan sosial berjalan lebih efektif. Rekomendasi meliputi peran masyarakat dalam melaporkan ketidaktepatan penerima bantuan melalui fitur "Usul Sanggah" di aplikasi Cek Bansos maupun secara langsung kepada pendamping PKH atau perangkat desa, memahami mekanisme dan regulasi penyaluran bantuan, serta tidak bergantung pada bantuan sosial. Pendamping PKH lebih tegas dan selektif dalam memantau dan memverifikasi penerima bantuan. Perangkat desa lebih adil dan transparan dalam distribusi bantuan PKH. Pemerintah pusat selalu memastikan akurasi data, serta peneliti lain diharapkan dapat memperdalam kajian dan membandingkan konflik sosial pada program bantuan lainnya.